



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN JABAR ZERO NEW STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG

Indah Trie Wahyuni Agustini¹⁾, Titin Rohayatin²⁾, Widuri
Wulandari³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung, dengan fenomena masalah belum optimalnya Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan informan yang berjumlah 18 informan. Adapun hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung belum optimal, dilihat dari 5 dimensi berikut: (1) Tujuan : belum terpenuhinya kebutuhan publik dan belum mencapai prevalensi yang ditargetkan (2) Lingkungan : cukup optimal, adanya peran dan koordinasi yang baik antar *stake holder* baik moril maupun materil (3) Arahan : kurangnya komunikasi antar *stake holder* dan belum adanya regulasi secara khusus tentang *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung (4) Tindakan : cukup optimal, dengan adanya peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam program yang diadakan oleh posyandu/puskesmas (5) Pembelajaran : masih adanya permasalahan yang sudah di evaluasi dan perlunya pemantauan intens dalam sistem penginputan data.

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Daerah, *Jabar Zero New Stunting*.

Abstract

This research is about the Regional Government's Strategy in Realizing West Java Zero New Stunting in Bandung Regency, with the phenomenon of the problem of not yet optimal Regional Government Strategy in Realizing West Java Zero New Stunting in Bandung Regency. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used were literature study and field study (observation, interviews and documentation). Data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions with eighteen informants. The results of this research indicate that the Regional

Government's Strategy in Realizing West Java Zero New Stunting in Bandung Regency is not yet optimal, seen from the following five dimensions : (1) Objective : public needs have not been met and have not reached the targeted prevalence (2) Environment : quite optimal, there is a good role and coordination between stake holders both morally and materially (3) Direction : lack of communication between stake holders and there is no specific regulation regarding West Java Zero New Stunting in Bandung Regency (4) Action : quite optimal, with increased knowledge and community participation in programs held by posyandu/puskesmas (5) Lessons learned : There are still problems that have been evaluated and the need for intense monitoring in the data input system.

Keywords: Strategy, Local Government, West Java Zero New Stunting.

PENDAHULUAN

Strategi pemerintah adalah proses yang diselaraskan dengan tujuan jangka panjang seorang pemimpin, yang meliputi : persiapan pendekatan agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan di masa depan. Strategi pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan kekurangan gizi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, gerakan ini merupakan gerakan masyarakat dari pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat perbaikan gizi pada masyarakat prioritas pada masa seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan mampu meningkatkan gizi pada masyarakat tertentu, seperti : memenuhi kebutuhan anak di bawah dua tahun (baduta), ibu hamil, ibu menyusui dan remaja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya pemerintah daerah memiliki tugas atau kewenangan untuk memberikan perhatian dan prioritas terhadap gizi masyarakat. Jika gizi masyarakat kurang baik, akan timbul permasalahan seperti masalah gizi, salah satunya *stunting*. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Anggita, Sakti (2020) tentang Pengaruh *Stunting* Pada Tumbuh Kembang Anak Periode *Golden Age*, bahwa *stunting* memperlambat kemampuan motorik kasar dan halus pada anak, sehingga perkembangan otak pada anak di periode *Golden Age* kurang optimal. Adapun sasaran

yang ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 untuk menurunkan prevalensi *stunting* hingga 14% di setiap kabupaten atau kota.

Permasalahan kritis Negara Indonesia ini mendorong Provinsi Jawa Barat bertindak dan berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yang sudah menjadi permasalahan di skala nasional. Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Barat mencanangkan strategi yang disebut “*Jabar Zero New Stunting*”, bahwa tidak ada masalah baru *stunting* di Jawa Barat. Program tersebut dibuat sebagai upaya atau inisiatif dalam mendukung program nasional dan tujuan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024.

Kabupaten Bandung adalah salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Kabupaten Bandung tahun 2022, memiliki jumlah penduduk 3,718,660 jiwa, dengan luas wilayah 176.239 km² dan memiliki 31 kecamatan dengan 270 desa. Sepuluh (10) kecamatan dari tiga puluh satu (31) yang prevalensi *stunting*-nya termasuk ke dalam kategori yang cukup tinggi. Hal ini juga didukung penelitian Sunaryo dkk (2022), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah melanjutkan kebijakan dan menyusun pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Tahun 2019 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 74 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *stunting*, seperti : pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri, mengadakan kelas pengantin (CATIN) dengan Kementerian Agama untuk kesiapan kehamilan pada remaja putri yang diharapkan memiliki anak yang sehat dengan status gizi yang baik. Disisi lain, prevalensi di Kabupaten Bandung masih cukup tinggi dibandingkan dengan prevalensi di Provinsi Jawa Barat ataupun skala nasional. Hal ini juga didukung oleh data dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Bandung (2023) berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yang dapat dijelaskan bahwa secara nasional prevalensi *stunting* masih rendah di Indonesia dan di Provinsi Jawa Barat dibandingkan pada Kabupaten Bandung yang prevalensinya masih cukup tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tujuan dari Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung, yaitu : belum tercapainya prevalensi *stunting* yang dituangkan di RPJMN, dan belum ada Rencana Strategis (Renstra) yang memuat secara khusus tentang *Jabar Zero New Stunting*. Hal ini didukung oleh penelitian Nugroho (2022) tentang Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Bandung Tahun 2021, bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung diwajibkan melakukan perubahan kebijakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021.
2. Lingkungan intenal dan eksternal di Kabupaten Bandung belum optimal, dalam hal ini belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan pemerintah, serta masih kurangnya koordinasi sehingga prevalensi *stunting* ini masih cukup tinggi. Hal ini didukung oleh berita online dari *Ayobandung.com* (2022) bahwa *stunting* di Kabupaten Bandung meningkat sebesar 15% dari tahun 2020, sehingga pertumbuhannya meningkat dari total 29.000 mencapai 10.000 dan dapat dikatakan meningkat sebesar 15%.
3. Arah atau koordinasi belum berjalan optimal. Hal ini juga didukung oleh berita online dari *news.republika.co.id* (2022), menurut Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten Bandung, masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang *stunting* dan masih belum memahami

pentingnya pendidikan, termasuk pendidikan keluarga. Hal ini didukung oleh penelitian Yuliani, Dewi dkk (2021), hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pencegahan pada *stunting*, khususnya kesehatan diri dan lingkungan, pola makan dan pola asuh.

4. Tindakan dari pemerintah daerah dalam Mewujudkan *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung belum optimal, dalam hal ini masih kurangnya peran dan tanggung jawab terhadap tugas serta koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh berita online dari dppkb.lubuklinggaukota.co.id (2023) bahwa Kabupaten Bandung secara bertahap telah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan, namun strategi pemerintah daerah ini belum optimal.
5. Pembelajaran atau evaluasi belum optimal dilaksanakan dan masih terjadinya permasalahan yang sudah di evaluasi sebelumnya. Hal ini juga didukung berita online dari timesindonesia.co.id (2022) yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Bandung, bahwa target nasional penurunan kasus *stunting* tahun 2024 adalah 14%, oleh karena itu pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat berjalan dengan baik di semua program prioritas yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif terstruktur.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik meneliti mengenai **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten **Bandung**”**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di dalam metode ini dimaksudkan untuk dapat menunjukkan fakta empiris dalam pandangan tujuan ilmiah, berdasarkan keilmuan yang ditekuni dapat mengetahui dan dapat mencari informasi sebanyak-

banyaknya tentang “Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung”, sehingga dapat memberikan gambaran, dan menganalisis penelitian dari 18 informan yang terdiri dari : Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bapelitbangda Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, DP2KBP3A Kabupaten Bandung; Puskesmas Sukamanah, Cilengkrang, Sumpersari; Posyandu Desa Margamukti, Desa Sumpersari, dan di Desa Cilengkrang; Keluarga Balita *Stunting* Desa Margamukti, Sumpersari, dan Cilengkrang; Keluarga Balita yang tidak terdampak *Stunting* di Desa Margamukti, Sumpersari, dan Cilengkrang.

Adapun instrument utama yaitu peneliti sendiri, yang dibantu dengan perangkat teknis, seperti : pedoman wawancara, dokumen, foto, laptop, HP, flash disk, alat tulis. Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang terdiri sebagai berikut :

1. Studi pustaka, peneliti mengumpulkan informasi beserta data-data pendukung pada latar belakang masalah, teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah dan data pendukung lainnya, data-data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal dan peraturan yang sesuai dengan fenomena masalah yang terjadi.
2. Studi lapangan
 - a. Observasi, peneliti mengumpulkan data, mencatat data, menggunakan teknik observasi partisipatif pada unit analisis objek penelitian yang dilaksanakan bulan Desember 2022-Januari 2023.
 - b. Wawancara, peneliti mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Topik penelitian melalui 18 informan yang diwawancarai menggunakan teknik partisipatif konvensional atau secara langsung dan terbuka di unit analisis objek penelitian pada bulan April 2023–Mei 2023 yang dilaksanakan di wilayah sekitar Kabupaten Bandung.
 - c. Dokumentasi merupakan bukti dari awal hingga akhir penelitian yang menjadi alat pendukung dalam penelitian,

berupa rekaman peristiwa, baik dalam bentuk tulisan, gambar ataupun karya monumental dari seseorang, rekaman, dan dokumentasi wawancara.

PEMBAHASAN

Strategi pemerintah untuk mengatasi kekurangan gizi di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Gerakan ini adalah gerakan pemerintah dan masyarakat untuk dapat mendorong perbaikan gizi masyarakat pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dan memastikan perlindungan serta pemenuhan gizi, terutama pada remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah usia dua tahun (*baduta*). *Jabar Zero New Stunting* merupakan program Provinsi Jawa Barat yang mendukung pada strategi nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memiliki peran penting di dalam Mewujudkan *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung. Dalam melaksanakan program ini, tidak hanya dilaksanakan oleh unsur pemerintah daerah, tetapi diperlukan peran masyarakat, dan diharapkan mampu bersinergi/bekerja sama.

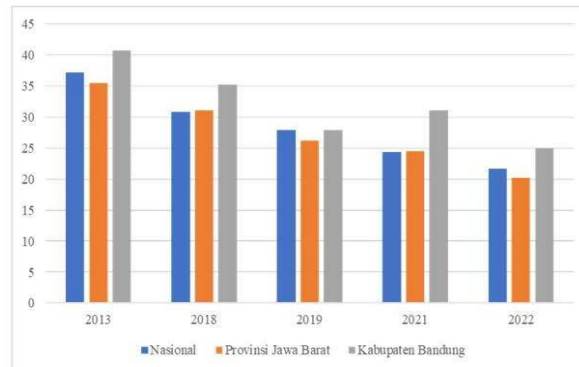
Dalam penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan teori Mulgan (dalam Suwarsono, 2012) untuk menganalisis dan mendeskripsikan pada 5 dimensi yang dapat menganalisis tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan dari strategi pemerintah daerah adalah mewujudkan *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung untuk mendukung strategi nasional yang tertuang dalam RPJMN. Dalam rangka mewujudkan misi dari Gubernur Jawa Barat dengan harapan tidak ada permasalahan baru *stunting*. Hal ini sejalan dengan Mulgan (dalam Suwarsono, 2012), bahwa tujuan menjadi langkah pertama dalam menjalankan suatu sasaran dan memenuhi kebutuhan

masyarakat serta pemerintah, dan memecahkan permasalahan. Namun, realita di lapangan masih banyak balita atau baduta yang terdampak *stunting* dan masih ditemukan permasalahan baru di Kabupaten Bandung. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1. Prevalensi *Stunting*



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Pada penjelasan grafik di atas, bahwa *stunting* masih cukup tinggi di Jawa Barat meskipun saat ini sudah terjadi penurunan pada tahun 2022 mencapai 20,2 % sedangkan di Kabupaten Bandung masih mencapai 25,0 % pada tahun 2022. Faktor penyebab *stunting* disekitar berkaitan erat dengan permasalahan kesehatan ataupun pelayanan kesehatan yang kurang; tingkat kemiskinan yang berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat, adapun faktor lainnya seperti : tingginya angka pernikahan dini, hamil tua, faktor genetik, sanitasi dan juga kesehatan di lingkungan yang kurang baik, serta pemenuhan gizi yang kurang tepat diberikan. Tujuan *Jabar Zero New Stunting* berdasarkan hasil wawancara, yaitu menindak lanjuti dari apa yang di tuangkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kejelasan tujuan dari program *Jabar Zero New Stunting* ini, tidak hanya untuk menurunkan prevalensi *stunting*, tetapi dengan harapan menciptakan adanya generasi unggul, generasi terbaik, dan meningkatkan kualitas SDM yang prima dengan ditandainya perkembangan dan pertumbuhan yang baik pada anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa tujuan dari *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung belum optimal dan belum mencapai strategi nasional sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus lebih berupaya dengan jangka waktu satu tahun terakhir. Pada kebutuhan publik, belum memenuhi dan mendukung misalnya : pada alat ukur seperti antropometri yang disalurkan dari Dinas Kesehatan dan Kementrian Kesehatan untuk desa, terdapat 1 desa 1 alat ukur, karena keterbatasan anggaran. Penggunaan serta perawatannya masih belum dipahami jelas, khususnya di tingkat desa, sehingga rentan rusak apabila tidak diawasi dengan baik.

2. Lingkungan

Lingkungan menganalisis keadaan sekitar dan kapasitas perangkat daerah. Lingkungan internal, mencakup anggaran dan SDM, semakin banyaknya anggaran semakin banyak juga sasaran yang terpenuhi. Lingkungan eksternal, mempertimbangkan perspektif pada pendidikan, perekonomian, pola asuh, pemahaman dan lingkungan dari luar yang berpengaruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinkes Kabupaten Bandung, bahwa terdapat empat bidang di Dinkes Kabupaten Bandung yaitu : Posyankes, P2K, SDK dan Pemberdayaan, keempat bidang tersebut saling berkoordinasi, berkerjasama dan juga saling bersinergi secara internal dengan tugas pokok dari bidangnya masing-masing, dan telah melakukan beberapa intervensi gizi spesifik percepatan penurunan *stunting* yang mendukung pada program *Jabar Zero New Stunting* untuk kelompok sasaran seperti: 1.000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui dan anak 0-23 bulan) dan kelompok sasaran usia lainnya (remaja putri dan wanita usia subur, dan anak 24-59 bulan). Selain itu, adapun hasil wawancara dari beberapa puskesmas, kader di wilayah, keluarga yang terdampak *stunting* dan keluarga yang tidak terdampak *stunting*, bahwa dukungan internal ini sudah optimal dan saling bersinergi, seperti alokasi anggaran dari dana desa, pemberian

PMT tambahan, pemantauan status gizi anak, pemberian PMT kepada ibu hamil, pelaksanaan sosialisasi gizi, pemeriksaan, penanganan secara khusus untuk keluarga yang beresiko *stunting* serta pelatihan kepada kader di wilayah.

Dukungan eksternal cukup optimal, melalui peran para stakeholder, sebagaimana hasil wawancara dengan Dinkes Kabupaten Bandung, bahwa peran lintas sektornya sudah saling membantu dan bersinergi satu sama lain, Tim Percepatan Penanganan *Stunting* nya juga sudah baik, dan dukungan dari Dinas Pendidikan juga ikut membantu dalam mensosialisasikan dan melaksanakan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri di tiap-tiap sekolah; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan pemberian bibit ikan, program pemberian telur sehari satu; DP2KBP3A dsb.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa lingkungan internal dan eksternalnya sudah cukup optimal melalui peran antar *stakeholder* dan dukungan yang diberikan berupa pelayanan/penanganan pada kesehatan, serta bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) baik dari desa, dinas, dsb.

3. Arahan

Arahan yang jelas akan menyesuaikan dengan keadaan dan sejalan dengan peraturan atau regulasi yang menjadi payung hukum dalam menjalankan suatu tindakan dan tidak bertentangan. Arah strategi pemerintah daerah mencakup langkah-langkah seperti : peningkatan akses terhadap gizi yang baik, perbaikan pola makan, penyediaan suplemen gizi, penyuluhan gizi kepada ibu hamil dan balita, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya nutrisi yang seimbang.

Hasil wawancara dengan informan dari Dinkes Kabupaten Bandung, beberapa puskesmas dan kader wilayah, pelaksanaan posyandu sudah diarahkan di masing-masing RW melalui grup

Whats-App dan memiliki jadwal tersendiri, disebarluaskan melalui pengeras suara masjid pada hari pelaksanaan. Disamping itu, para kader masih kesulitan memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang informasi mengenai *stunting* dan perkembangan yang terjadi pada anak. Penerimaannya sangatlah beragam, dimulai dari yang mudah menerima, susah menerima, dan sulit percaya pada tenaga kesehatan. Dalam hal ini, tenaga kesehatan perlu menyesuaikan dan meyakinkan, serta membangun kerjasama pada mitra yang menjadi kepercayaan masyarakat disekitar.

Adapun regulasi dari strategi pemerintah provinsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penanganan *Stunting* yang menyatakan kabupaten/kota di Indonesia dapat menurunkan prevalensi *stunting* sebesar 14% pada tahun 2024. Regulasi di Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor. 107 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa tanggung jawab dari Percepatan Penurunan *Stunting* yang merupakan tanggung jawab dari perangkat daerah yang mengurus urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya. Kabupaten Bandung telah memiliki Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*, bahwa dalam rangka untuk mendukung program prioritas nasional dalam penurunan *stunting* perlu dilakukan pendekatan dengan multisektor melalui sinkronisasi aksi dari program kegiatan di tingkat pusat dan daerah, secara memadai, cepat, akurat, transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa belum adanya peraturan atau regulasi yang menyelaraskan program *Jabar Zero New Stunting*, adapun yang menjadi pedoman/peraturan tertinggi, tertuang pada Peraturan Presiden

Nomor 72 Tahun 2021. Dalam hal ini, bahwa belum adanya peraturan atau regulasi khusus tentang program tersebut yang mempengaruhi pada pemahaman tugas dan fungsi pada program tersebut. Koordinasi yang dilakukan belum optimal, hal ini terlihat pada koordinasi antar pihak masih terputus-putus.

4. Tindakan

Arahan strategi harus diterjemahkan dalam kebijakan dan rencana aksi yang saling berkaitan. Pengoperasiannya juga mempertimbangkan kapabilitas dari *stake holder* yang terlibat dalam tindakan dan menjadi suatu proses pencapaian tujuan/sasaran yang diharapkan. Strategi pemerintah daerah harus mampu menjelaskan tindakan *konkret* yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari program *Jabar Zero New Stunting*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, bahwa adanya anggaran yang cukup. Dalam segi anggaran yang digunakan, terdapat dua sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran provinsi untuk mendukung penurunan *stunting*. Terdapat tindakan yang sudah dilaksanakan di pemerintahan setempat seperti : pelayanan terpadu dan pelaksanaan CATIN, pemberian PMT melalui GEKSOR, pemberian TTD (Tablet Penambah Darah), pelatihan kader, pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi EPPGBM (Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Pemerintah setempat berusaha secara terus menerus melakukan upaya dalam penurunan *stunting*, misalnya adanya kendala jarak dalam akses kesehatan dari masyarakat setempat dengan memberikan solusi untuk mendatangi dari rumah ke rumah, khususnya penanganan kepada keluarga balita yang terdampak *stunting*.

Berdasarkan penjelasan di atas, tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Bandung sudah cukup optimal meskipun terdapat kendala pada pelaksanaannya, tetapi memiliki solusi dari permasalahan di masyarakat setempat

dengan datang dari rumah ke rumah, sehingga ketika adanya pelaksanaan sosialisasi dan penimbangan di posyandu terdapat peningkatan dari jumlah kehadiran masyarakat di Kabupaten Bandung.

5. Evaluasi

Banyaknya balita/baduta yang terdampak *stunting* di Kabupaten Bandung, menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah daerah. Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan adapun Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 Tentang Percepatan Penanganan *Stunting*, yang menjelaskan bahwa perangkat daerah sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan juga evaluasi daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam penilaian ini, perangkat daerah menghitung dari perolehan kinerja yang berdasarkan indikator dari penurunan *stunting* setiap tahun dan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di perangkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Bapelitbangda, DP2KBP3A Kabupaten Bandung, bahwa evaluasi dilaksanakan pada setiap tahunnya melalui penilaian kinerja pada tingkat kabupaten/kota, dan mengisi beberapa instrumen yang perlu dilengkapi dari data aksi 1-8. Penilaian tahapan perencanaan tersebut, di mulai dari tahapan perencanaan analisis dan situasi, program, sumber pendanaan, regulasi, kelembagaan, publikasi data, hingga menyusun rekomendasi di tingkat provinsi yang dilaksanakan rutin setiap tahun dan memberikan peringkat untuk kabupaten atau kota yang terbaik berupa penghargaan. Kabupaten Bandung, belum pernah mendapatkan nominasi tersebut, namun mendapatkan penghargaan secara langsung dari Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Kabupaten Bandung sebagai salah satu narasumber terbaik dalam acara odading (obrolan daring cegah *stunting*) sebagai *best practice* yang selalu berkomitmen dalam pencegahan

stunting dan sering turun langsung pada masyarakat yang terdampak.

Pelaksanaan evaluasi, dilaksanakan melalui pertemuan instansi dan *stake holder* di Kabupaten Bandung. Evaluasi ini membahas tentang penyerapan anggaran, pelaksanaan kegiatan yang tercapai atau tidak tercapai, adanya *refocusing* APBD, hasil yang dicapai dan dilaksanakan di semester pertama dan semester akhir pada akhir tahun. Evaluasi ini melibatkan keseluruhan *stake holder* dari perangkat daerah seperti : dinas badan, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi provinsi (seperti : PERSAJI, IBI (Ikatan Bidan Indonesia)) dan NGO (seperti : Nutrisi Nasional).

Hasil dari evaluasi yang dilaksanakan bahwa terdapat permasalahan yang berulang meskipun sudah di evaluasi sebelumnya. Permasalahan tersebut, misalnya : keterbatasan anggaran, koordinasi yang masih perlu ditingkatkan, pelaksanaan pelatihan untuk pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM (Kader, lintas sektor, dan Tenaga Kesehatan) masih perlu di tingkatkan, perekonomian, lingkungan, dan adapun sistem yang kurang mendukung dari EPPGM dan SSGI yang memiliki data perbedaan yang jauh. Pada aplikasi EPPGM biasanya diinput oleh kader di wilayah, namun yang terjadi adalah penginputan yang kurang sesuai. Terkadang penginputan yang dilakukan oleh kader yang belum diberikan pelatihan, sehingga terjadi ketidak akuratan data yang di input. Berdasarkan penjelasan di atas, evaluasi yang dilaksanakan dalam Mewujudkan *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung belum optimal dan masih ditemukan permasalahan dari tahun ketahun, misalnya mengenai penginputan data ataupun sistem dari EPPGM yang kurang mendukung, sehingga masih terjadinya perbedaan atau ketidak akuratan data dengan realita di lapangan. Bentuk evaluasi yang dilaksanakan seperti penilaian, belum terlalu luas untuk dapat diterapkan khususnya di tingkat desa, yang memerlukan

pemantauan secara khusus.

KESIMPULAN

Program *Jabar Zero New Stunting* merupakan salah satu upaya Provinsi Jawa Barat untuk mendukung program nasional, dengan harapan tidak ada kasus baru *stunting*. Target tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat mencapai 15,2 % sedangkan target pada nasional sebesar 14%. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung belum optimal, berdasarkan teori Strategi Mulgan dengan 5 dimensi (tujuan, lingkungan, arahan, tindakan dan pembelajaran) dalam hal ini terlihat optimal pada 2 (dua) dari 5 (lima) dimensi, yaitu :

1. Tujuan

Tujuan dengan indikator yang menggambarkan kebutuhan publik dan tujuan yang ingin dicapai belum optimal di Kabupaten Bandung. Hal ini terlihat bahwa belum terpenuhinya kebutuhan publik (masyarakat dan pemerintah) karena keterbatasan anggaran. Tujuan *Jabar Zero New Stunting* belum dapat dicapai sebagaimana semestinya, dan belum tercapai dengan tujuan nasional, yaitu prevalensinya sebesar 14% *stunting*, sedangkan Kabupaten Bandung prevalensinya mencapai 25,0%.

2. Lingkungan

Lingkungan dengan indikator internal/eksternal sudah optimal. Adanya peran dan koordinasi yang baik antar *stake holder* yang mendukung baik moril maupun materil, seperti : pelayanan dan penanganan, bantuan PMT yang diberikan dari dinas yang berusaha untuk dapat menyelesaikan permasalahan *stunting* di Kabupaten Bandung.

3. Arahan

Arahan dengan indikator Regulasi/Peraturan Perundang-Undangan dan koordinasi belum optimal di Kabupaten Bandung. Koordinasi antar *stakeholder* masih kurang dalam komunikasi.

Rencana Strategis (Renstra) yang memuat secara khusus tentang *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung belum ada, belum adanya peraturan yang menyelaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penanganan *Stunting*, dan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 74 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Penanggulangan *Stunting*, sehingga hal ini mempengaruhi pada pemahaman tugas dan fungsi pada program tersebut.

4. Tindakan

Tindakan dengan indikator aksi, *Jabar Zero New Stunting* di Kabupaten Bandung cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pengetahuan, partisipasi masyarakat dan aksesibilitas dalam berpartisipasi mengenai program dari posyandu, puskesmas ataupun desa, baik dari keluarga balita *stunting* ataupun keluarga yang tidak terdampak *stunting* di Kabupaten Bandung;

5. Pembelajaran

Pembelajaran dengan indikator evaluasi belum optimal dan masih ditemukan permasalahan dari tahun ketahun, misalnya dalam sistem EPPGM yang diinput oleh kader masih terjadinya perbedaan data, sehingga perlunya pemantauan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achari. (2021). *Pencegahan Stunting Pentingnya Peran 1000 Hari Pertama Kebutuhan*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Mulgan, G. (2009). *The Art Of Public Strategy*. New York : Oxford.

Suwarsono, M. (2012). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Suwarsono, M. (2017). *Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta : Erlangga.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : CV

Alfabeta. Syafiie, I. K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Sukanto. (2011). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta : BPF.

Sondang P, Siagian. (2005). *Manajemen Stratejik*. Jakarta : Bumi Aksara
Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*, Jakarta : Grasindo.

Yunus, D. (2012). *Prinsip Perumusan Strategi Dalam Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah :

Abdaloh. (2019). No Title. *8 Kecamatan Di Kabupaten Bandung Jadi Prioritas*, 1. <https://www.ayobandung.com/bandung/pr-79650391/8-kecamatan-dikabupaten-bandung-jadi-prioritas-penanganan-stunting>.

Anggita, Sakti. (2020). *Pengaruh Stunting Pada Tumbuh Kembang Anak Periode Golden Age, 6 (1)*, <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FKIP/article/view/7009/603>.

Hayati, Donald, Neni. (2022). *Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sangihe)*, 1 (2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/42186/37323>

Nugroho, Hardianto Heru. (2022). *Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung tahun 2021*. <http://repository.unas.ac.id/5577/2/BAB%201.pdf>.

Sunaryo, D.R., Candradewini, C., & Arifianti, R. (2022). *Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung*. Responsive, 4 (4),

<https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716>.

Susanti, Mardhiah. (2022). *Strategi Pemerintah Simeulue dalam Menangani Prevalensi Stunting pada Anak Balita*, 2 (1), <https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/32/27>.

Tjandra. (2019). *Prevalensi Psikosis di Indonesia Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 1 (3), <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/jpppk/article/view/1882>.

Tiara, Zulfa. (2023). *Model Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Penanganan Stunting tahun 2019 (Studi Kerjasama Pemerintah Lampung Tengah dan PT. Great Glant Pineapple dalam Mengatasi Stunting)*. <http://digilib.unila.ac.id/68636/2/Proposal%20Skripsi%20TANPA%20AB%20PEMBAHASAN%20-%20Tiara%20Zulfa%20Elwani%20%20.pdf>.

Yuliani, Dewi. (2021). *Aksi Pengubahan Perilaku Cegah Stunting di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat*. *Jurnal Unla*, 5 (18), <https://jurnalunla.web.id/alunla/tiarsie/index.php/tiarsie/article/view/125/78>.

Zurhayanti (2022). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Balita Stunting Pada Balita*. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 1 (5), <http://jurnalilmukebidanan.akbiduk.ac.id/index.php/jik/issue/view/1>.

Peraturan :

Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat

Penyakit.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan *Stunting*.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* di Jawa Barat.

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Penanggulangan *Stunting*.

